

TEORI *STATE ACTION DOCTRINE* SEBAGAI DASAR UNTUK MELAKUKAN *PUBLIC CARTEL* DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Josephine Angelika Damanik¹, Karina Dwi Nugrahati Putri²

INTISARI

Penelitian dalam Penulisan Hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan *state action doctrine* sebagai dasar untuk melakukan *public cartel* yang ditinjau dari Undang-Undang Antimonopoli. *State action doctrine* sendiri dapat ditemukan di Pasal 50 dan Pasal 51 UU Antimonopoli. Selain itu, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kelemahan dari pelaksanaan *public cartel* di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Antimonopoli.

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normative. Adapun data sekunder diperoleh dari hasil dari studi kepustakaan. Data tersebut dikembangkan dengan cara dianalisis secara kualitatif dan diuraikan menggunakan metode deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa *state action doctrine* yang dapat dijadikan dasar sebagai *public cartel* terdapat dalam Pasal 50 huruf a UU Antimonopoli. *Public cartel* harus memenuhi ketentuan yang ada dalam pasal tersebut agar *public cartel* dapat dijalankan. Selain itu, *public cartel* juga dapat diberlakukan kepada pelaku usaha kecil sebagaimana diatur dalam Pasal 50 huruf h UU Antimonopoli dengan tetap memerhatikan ketentuan dalam Pasal 50 huruf a UU Antimonopoli. Dalam penerapannya, kelemahan penerapan *public cartel* di Indonesia salah satunya adalah belum dapat berjalan dengan efektif dan efisien dikarenakan masih berdasar dari peraturan perundang-undangan yang kaku.

Kata Kunci: *state action doctrine*, *public cartel*, Pasal 50 huruf a

¹ Mahasiswi Strata-1 di Departemen Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

² Dosen Departemen Hukum Bisnis di Fakultas Hukum Bisnis Universitas Gadjah Mada

**STATE ACTION DOCTRINE THEORY AS A BASIS FOR CONDUCTING THE
PUBLIC CARTEL REVIEWED FROM LAW NUMBER 5 OF 1999
CONCERNING PROHIBITION OF MONOPOLY PRACTICES AND UNFAIR
BUSINESS COMPETITION**

Josephine Angelika Damanik³, Karina Dwi Nugrahati Putri⁴

ABSTRACT

The purpose of this legal research is to identify and to analyse the application of state action doctrine as the basis for conducting a public cartel reviewed from Law No 5 of 1999. The state action doctrine itself can be found in Article 50 and Article 51 of Law No 5 of 1999. Furthermore, the purpose of this research is to determine the weaknesses of the implementation of the public cartel in Indonesia reviewed from Law No 5 of 1999.

This research uses a normative legal research method. The secondary data are obtained from the results of the literature study. Then, the data are analyse qualitatively and explained using descriptive methods.

The result revealed that the state action doctrine that can be used as the basis for a public cartel is contained in Article 50 (a) of Law No 5 of 1999. The public cartel must fulfil the provisions contained in the article so that the public cartel can be run. In addition, the public cartel can also be applied to small business actors as stipulated in Article 50 (h) of Law no 1999 while still taking into account the provision in Article 50 (a) of Law no 1999. In its application, the weakness of the implementation of the public cartel in Indonesia is that it has not been able to run effectively and efficiently because it is still based on rigid laws and regulations.

Keywords: *state action doctrine, public cartel, Article 50 (a)*

³ Undergraduate student at Business Law Department, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

⁴ Lecturer at Business Law Department, Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada